



**PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
MANAJEMEN PAJAK  
(Studi Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Santhy Setyaning Rahayu  
NIM 130810301099**

**PROGAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
MANAJEMEN PAJAK  
(Studi Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Oleh:

**Santhy Setiyaning Rahayu  
NIM 130810301099**

**PROGAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, akhirnya skripsi ini telah usai dan saya ingin mempersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Samuji dan Ibunda Tukinah yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat, dukungan, dan segalanya kepada penulis, serta kepercayaan penuh dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kakak ku yang tercinta, Titis Ita Trisnawati yang telah mendukung, memberi semangat, doa dalam pembuatan skripsi ini;
3. Sahabat tersayangku, Fransisca Indah Sugianto, Ayu Dewi Setyawati dan Yuli Susanti yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan menemani mulai awal hingga proses akhir skripsi ini;
4. Dosen pembimbing saya ibu Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak dan bapak Drs. Sudarno, M.Si, Ak.
5. Almamaterku tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

“Berbuatlah kebaikan kepada orang lain, seperti yang engkau inginkan mereka perbuat bagi dirimu. Engkau adalah jiwa yang sama berasal dari Brahman Yang Esa. Perlakukan setiap orang sebagai sahabat karibmu”

*(Yayur Veda XI.6)*

“With an education, you have everything you need to rise above all the noise and fulfill every last one your dreams.”

*(Michell Obama)*

“Untuk Jadi Maju Memang Banyak Hambatan. Kecewa Semenit Dua Menit Boleh, Tetapi Setelah Itu Harus Bangkit Lagi”

*(Joko Widodo)*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santhy Setiyaning Rahayu

NIM : 130810301099

Judul Skripsi : PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (STUDI PADA  
PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI)

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Juli 2017

Yang menyatakan,

Santhy Setiyaning Rahayu

NIM. 130810301027

**SKRIPSI**

**PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
MANAJEMEN PAJAK  
(Studi Pada Perusahaan Lq45 yang Terdaftar di BEI)**

Oleh:

**Santhy Setyaning Rahayu  
NIM 130810301027**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak  
Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sudarno, M.Si, Ak

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap  
Manajemen Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan LQ45 di  
BEI)

Nama Mahasiswa : Santhy Setiyaning Rahayu

NIM : 130810301099

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan :

Yang menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak

Drs. Sudarno, M.Si, Ak

NIP. 196701021992032002

NIP. 196012251989021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA

NIP.196408091990032001

**PENGESAHAN**

**PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
MANAJEMEN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG  
TERDAFTAR DI BEI)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Santhy Setiyaning Rahayu

NIM : 130810301099

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

04 Agustus 2017

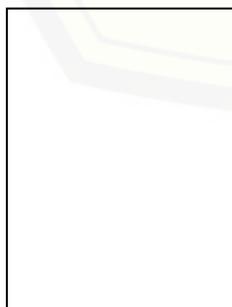
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Whedy Prasetyo, SE, M.SA, Ak (.....)  
NIP. 197705232008012002

Sekretaris : Taufik Kurrohmah, SE, M.SA, Ak (.....)  
NIP. 198207232005011002

Anggota : Aisa Tri Agustini, SE, M.Sc (.....)  
NIP. 198808032014042002



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, CA.  
NIP. 197107271995121001

Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Studi  
Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI)

**Santhy Setyaning Rahayu**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen pajak. Mekanisme *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Manajemen Pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan ETR. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan total sampel yang digunakan yaitu 14 perusahaan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

**Kata Kunci:** *Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Manajemen Pajak.*

*The Influence of Corporate Governance on Tax Management (Study on LQ45  
Company Listed in The BEI)*

**Santhy Setyaning Rahayu**

*Accounting Departement, Economic and Business Faculty, Jember University*

***Abstract***

*This study aims to know about the influence of corporate governance mechanisms on tax management. Corporate Governance mechanisms used in this study are board of commissioners, audit committee, institutional ownership and managerial ownership. Tax Management in this study is proxied by ETR. The data used in this study is secondary data obtained from the annual report of LQ45 companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2013-2015. Sampling technique used is purposive sampling with total sample used that is 14 company. Methods of data analysis in this study using multiple linear regression. The results showed that the size of board of commissioners, institutional ownership, and managerial ownership have an effect on tax management, while audit committee has no effect on tax management.*

***Keywords:*** *Audit Committee, Board of Commissioners, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Tax Management.*

## RINGKASAN

**Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Studi Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI);** Santhy Setiyaning Rahayu; 2017; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib badan (perusahaan) kepada negara dan akan digunakan untuk pembangunan nasional. Pungutan beban pajak yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan sehingga akan mendorong banyak perusahaan melakukan strategi-strategi untuk menghemat beban pajak. Salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan manajemen pajak. Dalam penelitian ini manajemen pajak diprosikan dengan tarif pajak efektif (*effective tax rate* - ETR). ETR digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi penghematan pembayaran pajak perusahaan.

Manajer merupakan orang yang bertindak menjalankan manajemen pajak. Ketika manajer tidak memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan maka akan terjadi asimetri informasi. Asimetri informasi yang terjadi antara agen dengan principal ini akan mengakibatkan masalah keagenan. Mekanisme corporate governance merupakan salah satu alat yang dapat mengontrol perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diatasi. Mekanisme corporate yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu perusahaan yang masuk dalam LQ45 berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2015 dan perusahaan dengan data lengkap yang mengungkapkan data mengenai jumlah dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit dari tahun 2013 sampai 2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.



## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kasih-Nya, serta memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance”. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasihat, saran maupun kritik yang sangat membantu penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Nining Ika Wahyuni, S.E, M.Ak., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan;
5. Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak dan Drs. Sudarno, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak, Taufik Kurrohman, S.E., M.Si., Ak, dan Aisa Tri Agustini, S.E., M.Sc selaku Dosen penguji yang telah bersedia mengarahkan dan memberikan ilmunya dalam menyempurnakan skripsi;
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmunya;
8. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya Jurusan S1 Akuntansi;

9. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Samuji dan Ibunda Tukinah yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat, dukungan, dan segalanya kepada penulis, serta kepercayaan penuh dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Kakak kandungku yang tercinta Titis Ita Trisnawati, yang telah mendukung, memberi semangat, doa dalam pembuatan skripsi ini;
11. Kakakku tersayang Ayu Festy Diana Putri, Indah Cahyandini, Lucky Maria, yang telah memberikan banyak pengalaman selama kuliah, semangat, doa, dan dorongan mulai awal perkuliahan sampai skripsi ini selesai;
12. Sahabatku tersayang, Fransisca Indah Sugianto, Yuli Susanti, Ayu Dewi Setyawati yang selalu memberikan pengalaman untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dukungan, semangat, dan menemani untuk pembuatan skripsi sampai selesai;
13. Temanku tersayang Gema Bangun Atmadja, Munfarida Rizky, Margaretha Nurastuti, Estu Yuliani Nur Azizah, Qurorun Ainayah, Fitria, Agustin Novita Sari yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan terus membantu didalam pengerjaan skripsi ini sampai selesai
14. Teman-teman Akuntansi 2013, Kos Bangka Raya No. 15 yang memberikan pengalaman, semangat dan doa dalam pembuatan skripsi ini; dan

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran demi kemajuan penulisan berikutnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 31 Juli 2017

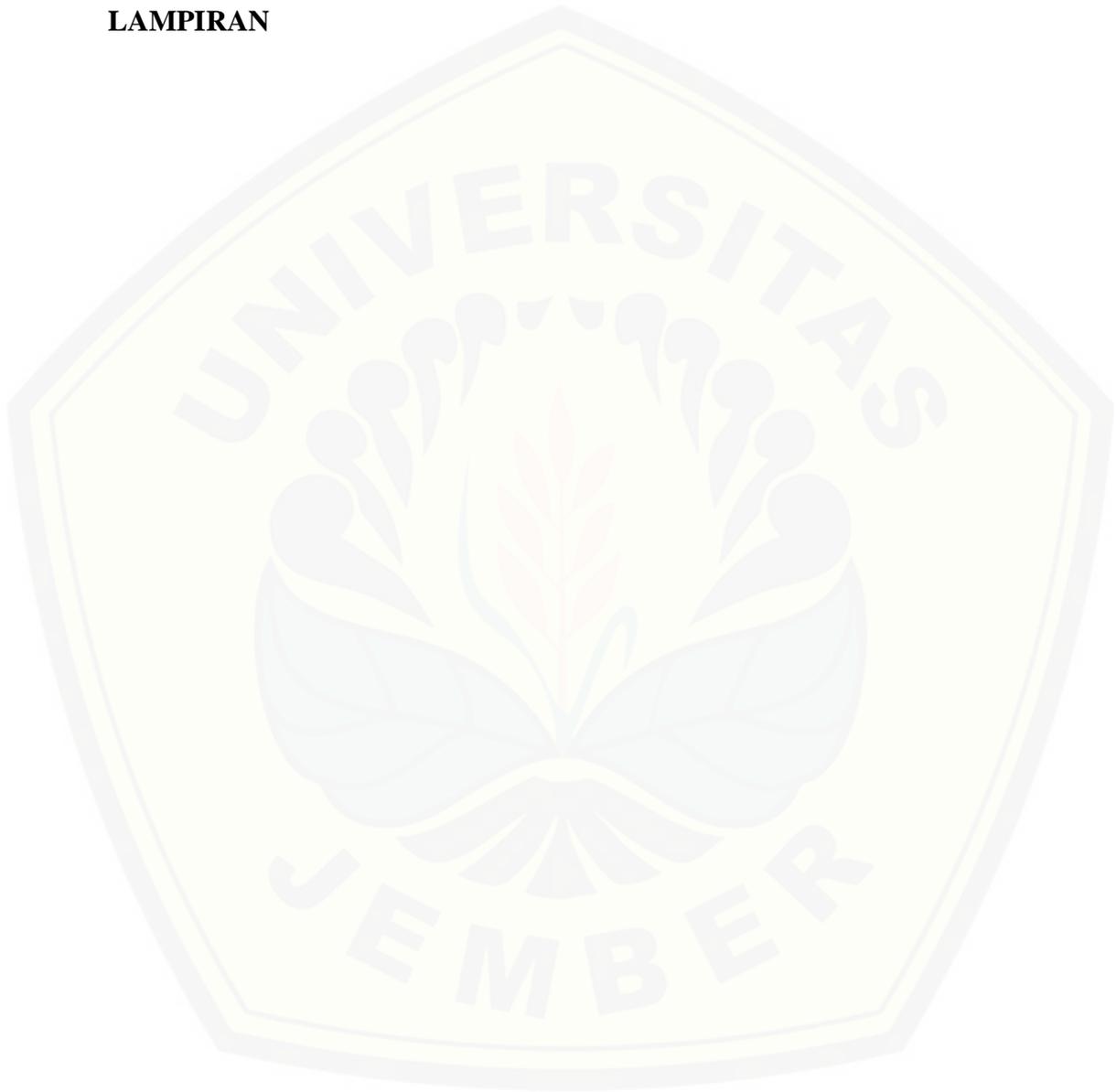
Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>PRAKATA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Teori Keagenan</b> .....	8
<b>2.2 Manajemen Pajak</b> .....	9
2.2.1 Pengertian Manajemen Pajak.....	9
2.2.2 Pengukuran Manajemen Pajak.....	13
<b>2.3 Corporate Governance</b> .....	13
2.3.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	13

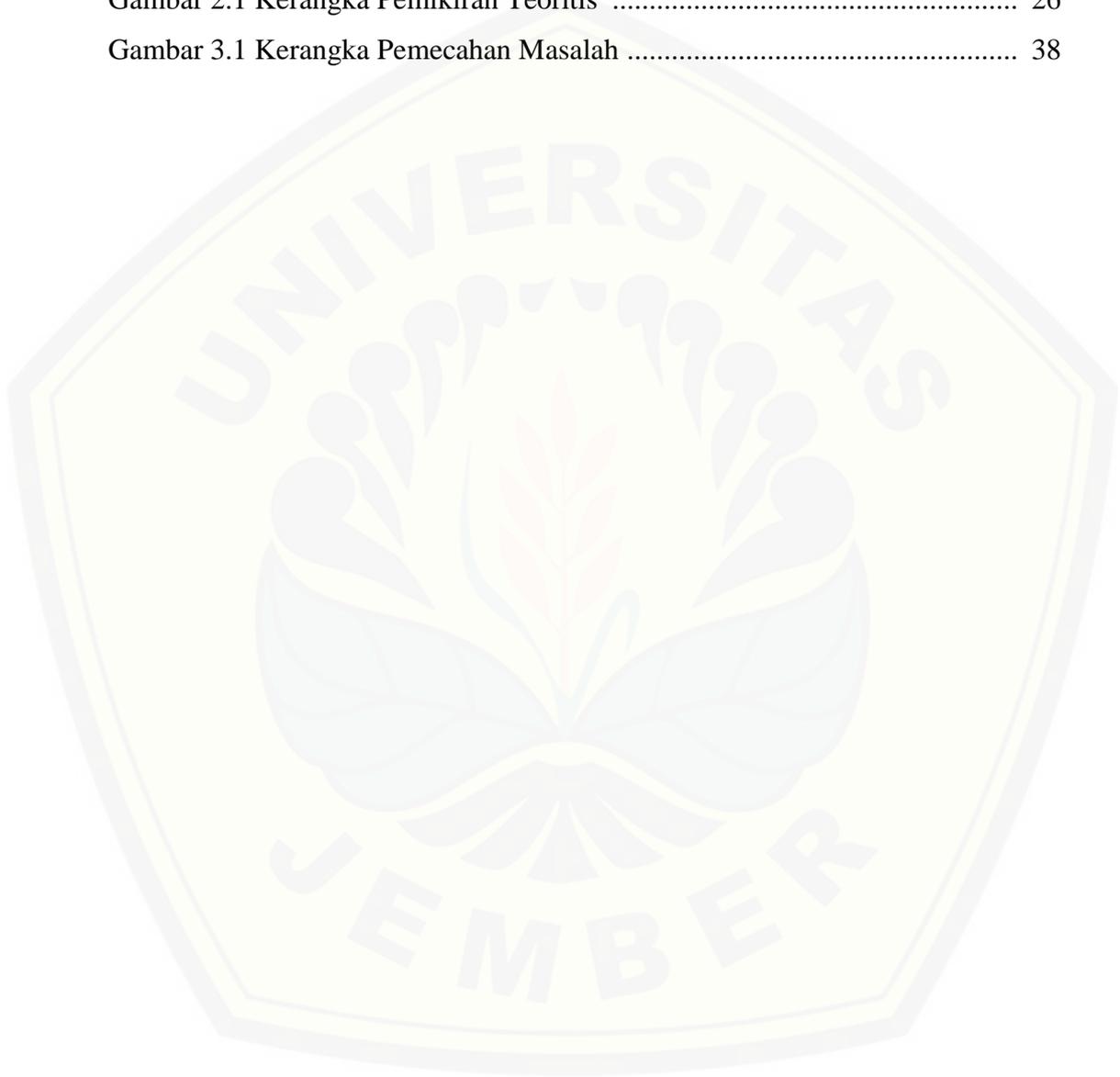
2.3.2 Prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	14
2.3.3 Manfaat Penerapan <i>Corporate Governance</i> .....	17
2.3.4 Tujuan Penerapan <i>Corporate Governance</i> .....	18
2.3.5 Unsur-Unsur <i>Corporate Governance</i> .....	18
2.3.6 Mekanisme <i>Corporate Governance</i> .....	18
<b>2.4 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>22</b>
<b>2.5 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>25</b>
<b>2.6 Perumusan Hipotesis</b> .....	<b>26</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	30
3.2 Populasi dan Sampel .....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.4 Identifikasi Variabel Penelitian .....	31
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	31
3.5.1 Variabel Dependen.....	31
3.5.2 Variabel Independen .....	31
3.6 Metode Analisis Data .....	33
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	33
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.6.3 Uji Hipotesis .....	36
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah .....	38
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
4.1 Deskriptif objek Penelitian .....	39
4.1.1 Sampel Penelitian.....	39
4.1.2 Deskripsi Sampel Penelitian .....	40
4.2 Analisis Data .....	41
4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	41
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	44
4.2.3 Pengujian Hipotesis .....	47
4.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis .....	52
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	<b>57</b>

<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	57
<b>5.2 Keterbatasan Penelitian</b> .....	58
<b>5.3 Saran</b> .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	26
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah .....	38



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian .....	39
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Sampel LQ45 yang Terdaftar di BEI.....	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas dengan <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	45
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas .....	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi .....	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda .....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F .....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik T .....	51

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel LQ45 yang Terdaftar di BEI
- Lampiran 2. Rangkuman Data Manajemen Pajak Tahun 2013-2015
- Lampiran 3. Rangkuman Data Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit Tahun 2013-2015
- Lampiran 4. Rangkuman Data Kepemilikan Institusional Tahun 2013-2015
- Lampiran 5. Rangkuman Data Kepemilikan Manajerial Tahun 2013-2015
- Lampiran 6. Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 7. Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 8. Hasil Pengujian Hipotesis
- Lampiran 9. Tabel Durbin-Watson (DW)
- Lampiran 10. Tabel F

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerapan *corporate governance* mulai menjadi perhatian bagi para pelaku bisnis di Indonesia sejak terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Rendahnya penerapan *corporate governance* menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan yang berkepanjangan ini. Pada tahun 1999 Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* untuk memperbaiki hal tersebut dan dikeluarkannya pedoman *good corporate governance* yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan. Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance* yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, *responsibility* dan *independency* (KNKG, 2006). Pertama, *fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundangan yang berlaku. Kedua, *transparency* (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Ketiga, *accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban setiap bagian perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Keempat, *responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian/kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Kelima, *independency* (kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kelima prinsip *corporate governance* apabila dijalankan dengan pengawasan yang dilakukan sedemikian rupa dalam sebuah perusahaan,

maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya di dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan *good corporate governance*. Bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (perusahaan), pajak merupakan salah satu komponen beban atau biaya yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan sangat penting dan memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pungutan beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan melakukan strategi-strategi untuk menghemat beban pajak.

Penghematan beban pajak sering kali dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari perundang-undangan dan peraturan pajak. Hal ini dianggap sah sepanjang transaksi yang dilakukan masih dalam lingkup perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, agar perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) seperti *tax evasion* maka diperlukan manajemen pajak. Manajemen pajak dapat diukur menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate* - ETR). ETR digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi penghematan pembayaran pajak perusahaan. Menurut Karayan dan Swenson dalam Hanum dan Zulaikha (2013) salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya. Manajemen pajak dapat membantu manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mengambil keputusan yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan dengan memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (*lawful*), akan membuat perusahaan dapat mencapai titik laba dan likuiditas yang optimal.

Dalam melakukan manajemen pajak, manajer merupakan orang yang bertindak menentukan dan menjalankan strategi-strategi yang dapat menghemat pembayaran pajak. Manajer sebagai pengelola perusahaan wajib memberi informasi tentang kondisi perusahaan salah satunya yaitu memberi informasi mengenai strategi untuk menghemat beban pajak perusahaan kepada principal.

Tetapi ketika informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan maka akan terjadi asimetri informasi. Asimetri informasi yang terjadi antara agen dengan principal ini akan mengakibatkan masalah keagenan.

Dalam mengatasi masalah keagenan dalam menjalankan manajemen pajak, diperlukan suatu pengendalian dalam memonitori praktik manajemen pajak. Disinilah letak pentingnya *corporate governance*. *Corporate governance* yang baik akan mengontrol manajemen untuk tidak melakukan tindakan oportunistik. Untuk membentuk tata kelola yang baik principal dapat melakukan berbagai cara dalam memonitori kegiatan operasional perusahaan, salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dibentuknya dewan komisaris.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilinda dan Nur (2013) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak menunjukkan bahwa dewan komisaris mempengaruhi manajemen pajak yang diproksikan dengan ETR. Dewan komisaris dinilai dapat mengatasi masalah keagenan dalam menjalankan manajemen pajak. Dewan komisaris sebagai wakil dari pemegang saham akan mengutamakan kepentingan pemegang saham yang menginginkan berjalannya tata kelola perusahaan dengan baik dan memaksimalkan kekayaan mereka yang merupakan tujuan utama pemegang saham dalam perusahaan. Dewan komisaris melalui perannya sebagai pengawas manajemen dan wakil dari pemegang saham akan berusaha untuk menjamin terlaksananya strategi perusahaan dan mengontrol manajemen dalam mengelola perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sindi (2016) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak menunjukkan hasil berbeda yaitu dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak yang diproksikan dengan ETR.

Principal dalam mengendalikan dan memonitor manajemen dapat membentuk komite audit untuk membantu dewan komisaris. Perusahaan sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor KEP-643/BL/2012 diwajibkan membentuk komite audit. Komite audit memiliki peran menjaga kredibilitas laporan keuangan, memberikan saran serta rekomendasi yang berhubungan dengan keuangan dan operasional perusahaan kepada dewan komisaris, menjaga sistem pengawasan yang memadai serta dilaksanakannya *corporate governance*.

Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik dan dapat mengurangi keinginan manajer untuk melakukan tindakan agresif di dalam menjalankan manajemen pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana (2015) tentang pengaruh *corporate governance* dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak yang diprosikan dengan CETR. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sindi (2016) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak yang diprosikan dengan ETR.

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional dan manajerial dapat mengontrol dan memonitoring manajer dalam menjalankan manajemen pajak. Semakin tinggi persentase kepemilikan saham, maka akan semakin tinggi pula tingkat monitoring yang dilakukan oleh investor. Kepemilikan manajerial menunjukkan peran ganda seorang manajer yaitu sebagai pengelola perusahaan yang bertindak sekaligus sebagai pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Aria (2012) tentang pengaruh kompensasi manajemen dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak perusahaan menunjukkan hasil bahwa berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak yang diprosikan dengan CETR. Peran ganda yang dimiliki oleh manajer ini dapat mengontrol terjadinya tindakan oportunistik di dalam mengelola perusahaan dan manajemen pajak. Manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham akan berusaha untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan dan meminimalkan kecurangan atau kesalahan yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham. Namun, penelitian Irawan dan Aria (2012) berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh May dan Dovi (2015) tentang *effective tax rate* efek dari *corporate governance* yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Kepemilikan institusional dapat mengontrol dan mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemegang saham (principal). Besarnya tingkat saham yang dimiliki oleh institusional akan

membuat semakin tinggi pula tingkat pengawasan yang dilakukan. Tingkat pengawasan yang tinggi ini akan mengurangi manajer melakukan tindakan agresif di dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novriansyah (2015) tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen pajak yang menyatakan kepemilikan institusional mempengaruhi manajemen pajak yang diproksikan dengan ETR. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) tentang pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *effective tax rate* yang menyatakan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi ETR.

Objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pada perusahaan di indeks LQ45. Indeks LQ45 merupakan indeks yang terdiri dari perusahaan yang memiliki likuiditas dan memiliki nilai kapitalisasi yang tinggi yang terpilih dari berbagai kriteria pemilihan. LQ45 merupakan indeks yang aman dimiliki karena kinerja perusahaan tersebut baik, sehingga dari sisi risiko, kelompok saham LQ45 memiliki risiko terendah dibandingkan dengan saham-saham lain (Sigit, 2013). Meskipun memiliki prospek yang baik, bukan berarti investor tidak akan melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, salah satunya yaitu menganalisis kinerja perusahaan.

Menurut Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))<sup>1</sup>, kriteria pemilihan perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ45 yaitu, 1) Merupakan urutan tertinggi berdasarkan frekuensi transaksi, 2) Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar regular (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir), 3) telah tercatat di BEI minimum 3 bulan, 4) keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar regular. Kondisi ini menunjukkan perusahaan yang masuk di LQ45 tidak lepas dari naik turunnya kinerja manajemen dalam mengelola aktivitas perusahaan yang salah satunya adalah aktivitas manajemen pajak. Selain itu, pemilihan objek pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 dikarenakan perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 terdiri dari berbagai perusahaan yang

---

<sup>1</sup>) Diunduh pada tanggal 31 Juli 2017.

bergerak di berbagai sektor, sehingga diharapkan dapat mewakili perusahaan yang tercatat di BEI.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, penelitian ini dilakukan untuk menguji ulang tingkat keberhasilan *corporate governance* serta pengaruhnya terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan mengambil perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak dalam perusahaan-perusahaan terbaik dari berbagai sektor yang memiliki resiko rendah. Penelitian ini membahas tentang: “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Studi Kasus pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen pajak.
2. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak.
3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan mampu mempraktekkan teori yang telah didapat selama masa kuliah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan literatur ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan dan *corporate governance* serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan manajemen pajak



## BAB 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:269), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Teori agensi adalah asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen.

Konflik kepentingan antara pemilik modal (principal) dan manajer (agen) terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu masalah keagenan. Principal yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaan kepada agen sesuai dengan kontrak kerja. Principal menghendaki pertambahan kekayaan dan kemakmuran, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab yang harus dilaksanakan, para agen juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan termasuk memaksimalkan kompensasinya, sehingga muncullah konflik kepentingan antara principal dengan agen.

Masalah principal dan agen yang terjadi akan menimbulkan biaya yang disebut *agency cost*. Dengan adanya *agency cost* menjadikan beban biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi semakin tinggi termasuk biaya dalam menjalankan operasional perusahaan, sehingga manajemen dituntut bertindak efektif dan efisien. Disinilah pentingnya melakukan manajemen pajak sebagai salah satu cara dalam meminimalisir beban pajak perusahaan yang akhirnya bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan untuk memonitor masalah agensi dan mengurangi oportunistik yang dilakukan oleh manajer, salah satu cara yang

dapat dilakukan adalah dengan menggunakan *corporate governance*, karena pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan dapat memonitor dan mengurangi tindakan agresif manajer.

## 2.2 Manajemen Pajak

### 2.2.1 Pengertian Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak dengan legal dan merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Pohan (2013:13), manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Menurut Suandy (2011:6), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Suandy (2011:6) menjelaskan bahwa manajemen pajak mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki 3 fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini, perusahaan mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang akan dilakukan untuk menghemat beban pajak.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak dapat dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan membayar pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajibannya apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan/ yang terhutang.

Manajemen pajak bisa dikatakan baik apabila memenuhi 3 syarat, yaitu (Santoso dan Ning, 2013):

1. Tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara bisnis masuk akal karena manajemen pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *corporate global strategy*.
3. Didukung oleh bukti-bukti yang memadai baik dari segi pencatatan akuntansi-keuangannya maupun segi hukum seperti bukti tagihan, *invoice*, kontrak perjanjian dan dokumentasi pendukung lainnya.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen pajak diantaranya (Santoso dan Ning, 2013):

1. Fakta-fakta relevan

Perusahaan harus memahami faktor-faktor kunci seperti bidang usaha, tujuan transaksi, produksi, pendanaan, pemasaran dan berbagai situasi yang relevan.

2. Faktor-faktor perpajakan

Faktor-faktor perpajakan yang harus diketahui meliputi pengetahuan akan sistem perpajakan nasional yang berlaku dan sikap fiskus/petugas pajak dalam menginterpretasikan peraturan perpajakan.

3. Faktor-faktor di luar perpajakan

Faktor-faktor di luar perpajakan juga harus menjadi perhatian. Misalnya faktor status badan hukum, mata uang dan nilai tukar, sistem pengawasan devisa, program insentif investasi, sistem peradilan hukum pajak dan administrasi, stabilitas ekonomi dan politik negara, topografi tenaga kerja dan tingkat pengangguran, pasar, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa dan sistem akuntansi dan pembukuan.

Dalam praktik bisnis, pembayaran pajak diidentikkan sebagai beban sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Strategi penghematan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan harus bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir (Suandy, 2011:121). Menurut Suwarta dalam Maria (2013) strategi penghematan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Dilihat dari perspektif perpajakan pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan konsinyasi lebih menguntungkan dibandingkan perseroan terbatas. Pada perseroan terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan PPh perseroan akan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat

penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25%.

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau daerah terpencil seperti pengurangan PPh, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan objek PPh Pasal 21.
3. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum.
4. Pemilihan metode penilaian persediaan. Terdapat dua metode yang diizinkan dalam peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*).
5. Pemilihan metode penyusutan. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, jika pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena memberikan biaya yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
6. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak yang disebabkan oleh SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT, terdapat informasi pelanggaran, memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
7. Mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan undang-undang. Jika penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan. contohnya, biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran.

### 2.2.2 Pengukuran Manajemen Pajak

Cara mengukur manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif menurut Richardson dan Lanis dalam Iqbal (2013) merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif akan memberikan gambaran kepada perusahaan secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajaknya. Tarif pajak efektif dapat digunakan untuk melihat kebijakan seperti apa yang sesuai untuk perencanaan pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari yang ditetapkan menunjukkan bahwa perusahaan kurang maksimal dalam melakukan insentif perpajakan dalam meminimalkan pembayaran pajak. *PricewaterhouseCoopers* (PwC) dalam Desi (2013) merumuskan tarif pajak efektif sebagai total pajak penghasilan terhutang (beban pajak) dibagi dengan penghasilan sebelum pajak. GAO dalam Desi (2013) menyatakan bahwa rata-rata tarif pajak efektif yang diukur dari pajak penghasilan yang dibayar dibagi dengan penghasilan sebelum pajak sangat berguna untuk mengukur beban pajak yang sebenarnya.

## 2.3 *Corporate Governance*

### 2.3.1 *Pengertian Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* *corporate governance* atau tata kelola perusahaan merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan kata hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan

Menurut Sutedi (2011:1), *good corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Dalam Lampiran Surat Menteri Negara Penanam Modal dan Pembinaan BUMN Nomor S-106/M-PM.PBUMN/2000 tentang Kebijakan Penerapan *Corporate Governance*, menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif, dan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan definisi *corporate governance* di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan) pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang baik dan benar akan menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah.

### **2.3.2 Prinsip *Corporate Governance***

Dalam menerapkan *corporate governance* perusahaan harus menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* di setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip dasar dari *corporate governance* memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), prinsip *good corporate governance* yaitu:

1. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang di syaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan prinsip transparansi perusahaan harus menyediakan informasi memadai yang mudah diakses, meliputi keseluruhan kegiatan perusahaan, baik kegiatan yang berkaitan dengan keuangan maupun non-keuangan perusahaan. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan semua informasi tersebut diinformasikan dan dikomunikasikan secara proporsional kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam menjalankan prinsip akuntabilitas perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan, serta harus meyakini mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap

organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

3. *Responsibilitas (responsibilities)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam menjalankan prinsip *responsibilitas* perusahaan harus mempunyai organ yang berpegang pada prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan keselarasan lingkungan, terutama di sekitar perusahaan.

4. *Independensi (independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Dalam menjalankan prinsip *independensi* masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, dan tidak saling melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. *Kewajaran dan kesetaraan (fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas *kewajaran dan kesetaraan*. Dalam menerapkan prinsip *kewajaran dan kesetaraan* perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, dan memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang

diberikan perusahaan, serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan secara profesional.

### 2.3.3 Manfaat Penerapan *Corporate Governance*

Menurut *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), penerapan GCG dalam rangka pemenuhan kepatuhan, atau karena kebutuhan, maupun memanfaatkan pembelajaran yang ada, dapat memberikan manfaat bagi perusahaan antara lain:

1. Mempertahankan *going concern* perusahaan.
2. Meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar.
3. Mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*.
4. Meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*.
5. Melindungi organ dari investasi politik dan tuntutan hukum, dan
6. Membantu terwujudnya *good corporate citizen*.

Penerapan GCG juga memberikan manfaat kepada organ dan anggota perusahaan dalam mendukung pencapaian kinerja perusahaan, pemenuhan akuntabilitas, mengurangi *agency cost*, menjaga independensi dan profesionalisme organ dan anggota perusahaan, memenuhi kepatuhan, mengelola risiko dan hal-hal yang berdampak pada kesinambungan perusahaan, serta mewujudkan hubungan kerja yang beretika, adil dan bermartabat (IICG:2013).

Bagi mitra bisnis dan para pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*), mendapatkan manfaat dari perusahaan yang telah menerapkan GCG yaitu jaminan produk dan layanan yang berkualitas, komitmen dalam praktik bisnis yang beretika dan memenuhi tingkat kepatuhan yang baik, komitmen dalam ketepatan dan kewajaran pemenuhan perjanjian bisnis/kerja dan proses pengadaan, keterbukaan informasi dan menerima keluhan serta saran dan masukan dari *stakeholders*. Komitmen para pengelola terhadap penerapan GCG dan bisnis yang beretika dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya dunia bisnis yang terpercaya dan bermartabat sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri secara khusus dan perekonomian nasional.

### 2.3.4 Tujuan Penerapan *Corporate Governance*

Secara umum, penerapan prinsip *corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut (Surya dan Ivan, 2008:68):

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapat *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

### 2.3.5 Unsur-Unsur *Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2011:41), unsur-unsur *corporate governance* dibagi menjadi dua yaitu unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan (internal) dan unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan (eksternal).

#### a. Internal perusahaan

Adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal, seperti pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem remunerasi berdasarkan kinerja, dan komite audit.

#### b. Eksternal perusahaan

Adalah cara mempengaruhi perusahaan dengan menggunakan mekanisme internal seperti undang-undang dan peraturan hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, lembaga yang mengesahkan legalitas.

### 2.3.6 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan. Mekanisme *corporate governance* ditujukan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem

*governance* dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*, namun tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional (KNKG, 2006). Dewan komisaris memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan komisaris. Fungsi dewan komisaris adalah sebagai wakil dari pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan non independen. Dewan komisaris secara luas dipercaya memainkan peranan penting dalam pengendalian internal dan *corporate governance*, khususnya memonitor manajemen.

Menurut Egon Zehnder dalam Maria (2013), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan komisaris meliputi:

- 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
- 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.

- 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
- 4) Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan apabila diperlukan.
- 5) Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

## 2. Komite Audit

Komite audit sesuai dengan keputusan BAPEPAM dan LK Nomor KEP-643/BL/2012 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan, karena komite audit dibentuk untuk melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan perusahaan serta melaksanakan tugas penting yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-339/BEJ/07/2001 menyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.

Seperti diatur dalam keputusan BAPEPAM dan LK Nomor KEP-643/BL/2012 yang merupakan peraturan mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
  - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
  - c. Melakukan penelahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
  - d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
  - e. Melakukan penelahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
  - f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.
3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusional lain (Tarjo dalam Hanum dan Zulaikha, 2013). Kepemilikan institusi yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan.

Menurut Saptantinah dalam Muhammad (2015) Kepemilikan institusional sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Institusi sebagai investor yang *sophisticated* karena mempunyai kemampuan dalam memproses informasi dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian, akan semakin membatasi manajemen dalam memainkan angka-angka dalam laporan keuangan.

#### 4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan dalam Octalianna dan Deasy, 2013). Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Jensen dan Meckling dalam Irawan dan Aria, 2012). Manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha bekerja secara optimal dan tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri. Manajer akan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, sehingga kekayaan yang dimiliki perusahaan akan meningkat dan kesejahteraan pemegang saham juga akan meningkat.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Aria (2012) yang berjudul pengaruh kompensasi manajemen *dan corporate governance* terhadap manajemen pajak perusahaan yang meneliti kompensasi direksi dan kepemilikan manajerial yang merupakan variabel independen dan variabel dependen manajemen pajak yang diukur dengan CETR. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa besarnya kompensasi direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Penerapan *corporate governance* secara umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Novriansyah (2015) yang berjudul pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013 yang meneliti pengaruh komisaris independen, kompensasi manajemen eksekutif dan investor institusional terhadap manajemen pajak yang diukur dengan indikator *effective tax rate* (ETR)

menunjukkan hasil bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Meilinda dan Nur (2013) yang berjudul pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak yang meneliti mekanisme *corporate governance* yaitu jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi sebagai variabel independen dengan menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang, dan beda tarif pajak yang diukur dengan indikator GETR dan CETR. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap GETR dan CETR, persentase komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap GETR dan positif terhadap CETR, kompensasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap GETR dan CETR. Hasil dari variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap GETR dan CETR. Sedangkan beda tarif pajak menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap GETR dan CETR.

Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu, dkk (2015) yang berjudul pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak yang menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, umur dewan komisaris, dan rasio hutang, komposisi dewan komisaris, *gender diversity*, umur perusahaan, kinerja perusahaan, biaya iklan, dan pengeluaran modal sebagai variabel independen dan variabel dependen yaitu manajemen pajak. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris, umur dewan komisaris, dan rasio hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Komposisi dewan komisaris, *gender diversity*, umur perusahaan, kinerja perusahaan, biaya iklan, dan pengeluaran modal tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang berjudul pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 yang meneliti pengaruh komite audit, komisaris independen, dan investor institusional terhadap ETR perusahaan menunjukkan hasil bahwa ketiga variabel tersebut tidak

berpengaruh signifikan terhadap ETR. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, ROA, dan *capital intensity ratio* (CIR) dan menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap ETR. Sedangkan ROA dan CIR tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.

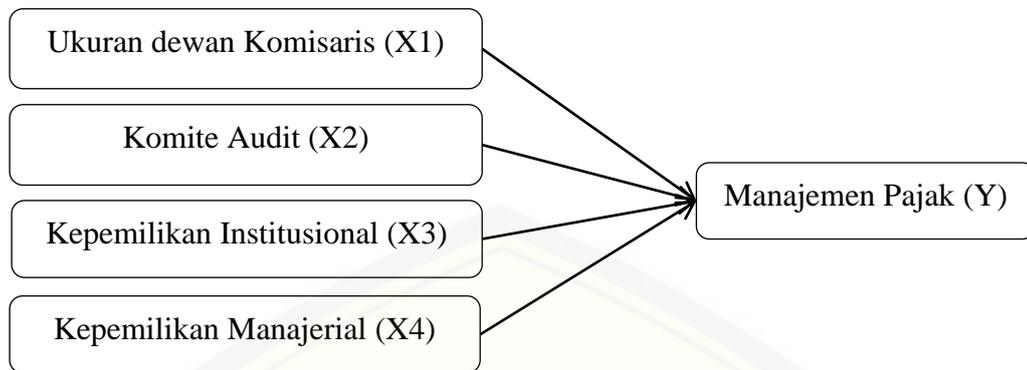
**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel-variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
1	Irawan dan Aria (2012)	Variabel independen: kompensasi manajemen, kepemilikan saham direksi, <i>corporate governance</i> . Variabel Dependen: manajemen pajak yang diproksikan dengan CETR.	<i>Regression panel data model</i>	Menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara <i>corporate governance</i> dan kompensasi dengan CETR.
2	Novriansyah (2015)	Variabel independen: komisaris independen, kompensasi manajemen, investor institusional. Variabel dependen: manajemen pajak yang diproksikan dengan ETR.	<i>Multiple regression analysis</i>	Menemukan hubungan yang simultan dan signifikan terhadap manajemen pajak dengan teknik pajak efektif.
3	Meilinda dan Nur (2013)	Variabel independen: jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi. Variabel dependen: Manajemen pajak yang diproksikan dengan CETR dan GETR.	<i>Multiple regression analysis</i>	Menemukan bahwa manajemen pajak GETR dan CETR memiliki hubungan yang berbeda, secara umum kemampuan menjelaskan manajemen pajak CETR lebih signifikan.

4. Pasaribu, Zaitul, dan Herawati (2015)	Variabel independen: Ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, umur dewan komisaris, <i>gender diversity</i> Variabel dependen: manajemen pajak.	<i>Multiple regression analysis</i>	Menemukan bahwa ukuran dewan komisaris, umur dewan komisaris, dan rasio hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan komposisi dewan komisaris, <i>gender diversity</i> , umur perusahaan, kinerja perusahaan, biaya iklan, dan pengeluaran modal tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
5. Hanum dan Zulaikha (2013)	Variabel independen: komisaris independen, komite audit, investor institusional Variabel dependen: <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	Uji asumsi klasik, regresi linier berganda	Menemukan hubungan yang negatif tidak signifikan antara komisaris independen, komite audit dan investor institusional dengan ETR.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini menguji tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Penelitian ini secara spesifik ingin mengungkapkan sejauh mana dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak. Untuk membantu dalam memahami dinamika variabel-variabel di atas, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diungkapkan, disusun hipotesis yang merupakan alur pikiran peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka penelitian yang disusun sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran Teoritis

## 2.6 Perumusan Hipotesis

### 2.6.1 Ukuran dewan komisaris terhadap manajemen pajak

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa manajer menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dewan komisaris mampu meminimalisir adanya konflik agensi, dewan komisaris sebagai principal bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling dalam Maria, 2013). Konflik agensi adalah asumsi tiap-tiap individu mempunyai motivasi untuk mementingkan dirinya sendiri sehingga akan menimbulkan adanya konflik kepentingan antara agen dan principal (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Meilinda dan Nur (2013) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris dalam perusahaan maka fungsi pengawasan yang ada akan semakin efektif dan dapat mencegah manajer melakukan usaha agresif dalam melakukan manajemen pajak. Fungsi pengawasan yang efektif ini akan mendorong manajer untuk menjalankan manajemen pajak sehingga akan meminimalkan beban pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Meilinda dan Nur (2013) menunjukkan jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas upaya perusahaan untuk melakukan manajemen pajak yang diprosikan dengan ETR. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil untuk penelitian ini sebagai berikut:

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak.

### 2.6.2 Komite audit terhadap manajemen pajak

Komite audit adalah komite tambahan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Fungsi komite audit yaitu untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, mengamati sistem pengendalian internal termasuk audit internal, mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan kecurangan dan tindakan melanggar hukum lainnya (Sarah, 2016). Dalam menjalankan tugasnya, apabila komite audit menemukan kecurangan yang dilakukan oleh manajer maka komite audit akan melaporkan kepada dewan komisaris serta memberikan masukan-masukan yang dapat digunakan untuk keberlangsungan operasional perusahaan. Fungsi komite audit juga dapat membantu dewan komisaris dalam mengatasi terjadinya masalah agensi. Masalah agensi timbul karena adanya asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan (Irawan dan Aria, 2012). Manajer selaku agen yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan principal. Perbedaan perolehan informasi ini mengakibatkan manajer melakukan tindakan untuk meningkatkan kepentingannya sendiri.

Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan mencegah tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit akan mendorong manajer untuk menjalankan manajemen pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Diana (2015) menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak yang diprosikan dengan CETR. Qurrotul (2015) menunjukkan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hipotesis yang dapat diambil untuk penelitian ini sebagai berikut:

H2: Komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak.

### 2.6.3 Kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak

Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan. Kepemilikan institusi dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham institusional lebih berpengalaman dibandingkan dengan kepemilikan saham individual. Dengan demikian, kepemilikan saham institusional akan semakin membatasi manajer dalam melakukan tindakan kecurangan serta dapat mengurangi terjadinya konflik keagenan. Munculnya konflik keagenan dikarenakan manajer (agen) yang tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan pemegang saham (principal) dan memanfaatkan asimetri informasi yang ada untuk meningkatkan kepentingannya sendiri. Anthony dan Govindarajan (2005) menyatakan konflik agensi diasumsikan bahwa tiap-tiap individu memiliki motivasi mementingkan dirinya sendiri sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan antara agen dan principal.

Kepemilikan institusional akan mendorong manajer untuk bekerja lebih efektif agar nilai perusahaan dapat meningkat. Meningkatnya nilai perusahaan akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham karena pemegang saham akan mendapatkan pembagian deviden yang lebih besar. Selain itu, meningkatnya nilai perusahaan ini akan mengakibatkan beban pajak menjadi tinggi, sehingga untuk meminimalkan beban pajak yang tinggi ini kepemilikan institusional akan mendorong manajer untuk melakukan strategi penghematan pajak yaitu melakukan manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan dalam melakukan manajemen pajak yang diprosikan dengan ETR. Novriansyah (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator ETR. Hipotesis yang dapat diambil untuk penelitian ini sebagai berikut:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak.

#### 2.6.4 Kepemilikan manajerial terhadap manajemen pajak

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer. Kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi masalah agensi diantara manajer dan pemegang saham yang dicapai dengan melalui penyelarasan kepentingan diantara pihak-pihak yang berbenturan kepentingan (May dan Dovi, 2015). Masalah agensi terjadi karena adanya asimetri informasi antara agen yang menjalankan kegiatan perusahaan dan principal yang merupakan pemegang saham. Anthoni dan Govindarajan (2005) menjelaskan bahwa masalah agensi timbul akibat adanya motivasi mementingkan diri sendiri pada tiap-tiap individu sehingga menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara principal dengan agen.

Kepemilikan manajerial akan mendorong manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena memiliki motivasi yang sama. Manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham akan berusaha untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, sehingga kesejahteraan manajer juga akan meningkat. Dalam usaha meningkatkan nilai perusahaan, kepemilikan manajerial akan mendorong manajer untuk melakukan manajemen pajak sehingga beban pajak perusahaan yang dibayarkan dapat berkurang. Penelitian yang dilakukan Irawan dan Aria (2012) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak yang diprosikan dengan ETR. Hipotesis yang dapat diambil untuk penelitian ini sebagai berikut:

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:13) metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti satu populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang diambil dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pertimbangan dan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang masuk dalam LQ45 berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2015.
2. Perusahaan dengan data lengkap yang mengungkapkan data mengenai jumlah dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit dari tahun 2013 sampai 2015.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari sumber penelitian utama. Sumber data sekunder berasal dari laporan tahunan (*annual report*)

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 dalam situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

### 3.4 Identifikasi Variabel Penelitian

Pada penelitian ini variabel-variabel yang digunakan yaitu variabel dependen dan variabel independen. variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah manajemen pajak. Variabel independen (X) yang akan diteliti antara lain ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

### 3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi variabel secara eksplisit mengidentifikasi variabel-variabel penelitian yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, definisi operasional dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam peneliti ini yaitu manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan Suandy (2011:6). Pengukuran manajemen pajak menggunakan tingkat pajak efektif (*Effective Tax Rate – ETR*). Tarif pajak efektif perusahaan dapat diukur menggunakan rumus (*PricewaterhouseCoopers* (PwC) dalam Desi (2013)):

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

#### 3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Dalam Definisi operasional dari masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. Ukuran Dewan komisaris

Dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada pihak manajemen (Meilinda dan Nur, 2013). Dewan komisaris diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan (Meilinda dan Nur, 2013).

$$\text{Dewan Komisaris } (X_1) = \sum \text{Seluruh anggota yang tergabung dalam dewan komisaris.}$$

### 2. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat professional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan (Diana, 2015). Komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan (Diana, 2015).

$$\text{Komite Audit } (X_2) = \sum \text{Seluruh anggota yang tergabung dalam komite audit.}$$

### 3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain) (Hanum dan Zulaikha, 2013). Kepemilikan institusional diukur dengan menghitung proporsi saham institusional dari seluruh saham yang beredar (Hanum dan Zulaikha, 2013).

$$\text{Proporsi Kepemilikan institusional } (X_3) = \frac{\sum \text{saham institusi}}{\sum \text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

#### 4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen baik direksi, komisaris, maupun karyawan (May dan Dovi, 2015). Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung proporsi jumlah saham manajerial dari seluruh saham yang beredar (May dan Dovi, 2015).

$$\text{Proporsi Kepemilikan manajerial} = \frac{\sum \text{saham manajerial}}{\sum \text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

### 3.6 Metode Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2013:19). Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model data penelitian memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung *multikolinearitas*, *heteroskedastisitas*. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji *multikolinearitas*, uji *heteroskedastisitas*, dan uji *autokorelasi*.

##### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali,

2013:160). Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan analisa grafik, yaitu dengan histogram dan *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Untuk menghindari adanya hasil yang menyesatkan menggunakan grafik, maka uji grafik ini dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria probabilitas dari uji normalitas dengan menguji uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai signifikan uji *Kolmogorov-Smirnov* bernilai di bawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
- b. Bila nilai signifikan uji *Kolmogorov-Smirnov* bernilai di atas 0,05 maka data berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013:105). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah *tolerance and variance inflation factor (VIF)*. Nilai *tolerance* digunakan untuk mengukur variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai yang tinggi. VIF diperoleh dengan:

$$VIF = \frac{1}{Tolerance}$$

Multikolinearitas dalam penelitian ini dianggap terjadi jika nilai  $VIF > 10$ , sedangkan  $VIF \leq 10$  menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* dibawah 0,10 atau sama dengan VIF di atas 10 (Ghozali, 2013:106)..

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013:139). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau varian tersebut homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode statistik berupa uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel independen berdasarkan asumsi sebagai berikut:

1. Jika probabilitas signifikan di atas tingkat 5% maka tidak mengalami heteroskedastisitas.
2. Jika probabilitas signifikan di bawah tingkat 5% maka mengalami heteroskedastisitas.

### 4. Uji autokorelasi

Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2013:110). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan metode uji Durbin-Watson (DW test). Metode Durbin-Watson menggunakan titik kritis yaitu batas bawah ( $d_l$ ) dan batas atas ( $d_u$ ).  $H_0$  diterima jika nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas atas nilai Durbin-Watson pada tabel.

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan tabel Durbin-Watson (Ghozali, 2013:111):

1. Jika  $0 < d < d_l$ , maka tidak ada autokorelasi positif.
2. Jika  $d_l \leq d \leq d_u$ , maka tidak ada autokorelasi positif.
3. Jika  $4 - d_l < d < 4$ , maka tidak ada korelasi negatif.
4. Jika  $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ , maka tidak ada korelasi negatif.
5. Jika  $d_u < d < 4 - d_u$ , maka tidak ada autokorelasi positif dan negatif.

### 3.6.3 Uji Hipotesis

#### 1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Manajemen pajak yang diukur dengan GETR
- $\alpha$  : Konstanta regresi
- $\beta$  : Koefisien regresi
- $X_1$  : Ukuran dewan komisaris
- $X_2$  : Komite audit
- $X_3$  : Kepemilikan institusional
- $X_4$  : Kepemilikan manajerial
- e : Error

#### 2. Koefisien Determinasi (Uji *Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013:97).. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2013:97).

### 3. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier. Pengujian ini dilakukan untuk melihat bahwa model regresi yang digunakan telah signifikan atau belum dengan ketentuan  $p \text{ value} < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95% (Ghozali 2013: 84). Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

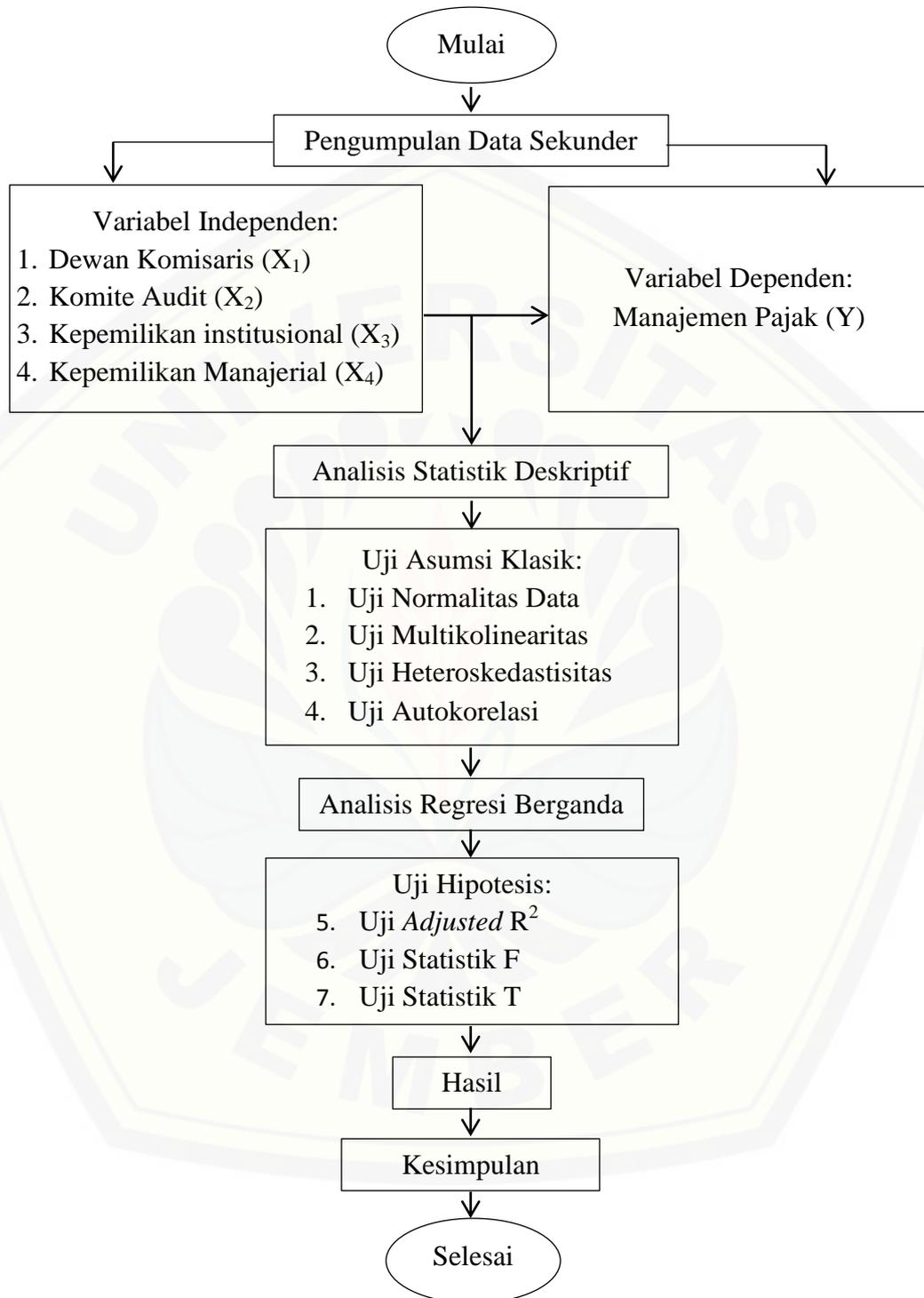
- a. Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $p \text{ value} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, dimana koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $p \text{ value} < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, dimana koefisien regresi signifikan. Hal ini berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 4. Uji Statistik T

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen secara parsial (individu) dalam menjelaskan perilaku pada variabel dependen (Ghozali, 2013:99). Pengujian ini menganggap variabel independen lainnya konstan dan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penerimaan dan penolakan hipotesis pada uji statistik t ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas nilai t atau signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima (secara parsial variabel ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak).
- b. Apabila probabilitas nilai t atau signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak, berarti (secara parsial variabel ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak).

### 3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 2. Kerangka Pemecahan Masalah

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil dari pengaruh ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen yang diproksikan dengan ETR. Berdasarkan uraian hasil yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diproksikan dengan ETR. Ukuran dewan komisaris dapat mendorong tingkat pengawasan dan memberikan kontribusi yang tinggi dalam pengambilan keputusan kegiatan perusahaan termasuk dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen pajak.
2. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak yang diproksikan dengan ETR. Komite audit tidak mempengaruhi didalam pengelolaan perusahaan dan tidak berperan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan beban pajak perusahaan. Komite audit bersifat independen dan lebih cenderung menjalankan tugasnya berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diproksikan dengan ETR. Kepemilikan saham institusional dapat mendorong manajer untuk menerapkan kegiatan perencanaan yang baik salah satunya yaitu manajemen pajak, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.
4. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diproksikan dengan ETR. Kepemilikan saham manajerial dapat mendorong manajer untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya yaitu melakukan manajemen pajak sebagai upaya penghematan beban pajak perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial akan membuat para manajer bertindak sebagai pemegang

saham sehingga setiap keputusan yang akan diambil penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak akan merugikan perusahaan.

5. Berdasarkan uji  $R^2$  variabel ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial cenderung kurang dominan dalam mempengaruhi nilai manajemen pajak yang diprosikan dengan ETR yaitu hanya kisaran 19%. Artinya kisaran 81% dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tidak pernah terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan 19% variabel dependen. Sedangkan 81% dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu, penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya seperti ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang perusahaan, jumlah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, serta komponen-komponen *corporate governance* lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control Systems*. Jakarta: Salemba Empat.
- Desi, Handayani. 2013. Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kepentingan Investasi dan Kepemilikan Pemerintah Terhadap Tarif Pajak efektif. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 6, Desember 2013 : 26-35*.
- Diana, Lestari. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* dan Intensitas persediaan terhadap Manajemen Pajak. *JOM FEKON, Vol. 2, No. 2. Oktober 2015*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 (Edisi 7)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, Hashemi Rodhian, Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate*. *Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 2. Tahun 2013:1-10*.
- Iqbal Nur Hakim. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak efektif. *Skripsi: Universitas Diponegoro*.
- Irawan, Hendra Putra, Aria Farahmita. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Khairunnisa, R. 2016. Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *JOM FEKON, Vo. 3, No. 1. Februari 2016*.
- Komite Nasional Good Corporate Governance. 2002. *Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- May, Wulandari dan Dovi Septiari. 2015. *Effective Tax Rate: Efek dari Corporate Governance*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam, Vol.3, No.2. Tahun 2015:177-183*.
- Maria, Meilinda. 2013. "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)". Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Meilinda, Maria, Nur Cahyonowati. 2013. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 1, No. 2. Tahun 2013:1*.
- Muhammad, Oktofian. 2015. "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (studi Empiris pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI

- Periode Tahun 2009-2013)”. *Skripsi :Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Novriansyah, Zulkarnaen. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, No. 1. April 2015*.
- Octalianna, Deasy Ariyanti Rahayuningsih. 2013. Analisis Kepemilikan Managerial Berbasis teori Keagenan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 15, No. 1, Juni 2013: 65-72*.
- Pasaribu, Ira Anggraini, Zaitul, Herawati. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Universitas Bung Hatta*.
- Pohan, Chairul Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Qurrotul, Ain. 2015. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Ilmu dan riset Akuntansi, Vol. 4, No. 12. 2015*.
- Santoso, Imam, Ning Rahayu. 2013. *Corporate Tax management: Mengulas upaya Pengelolaan pajak perusahaan secara Konseptual-Praktikal*. Jakarta : Ortax
- Sarah, Deasy Rumapea. 2016. Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris Serta Dewan Direksi Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. Skripsi: Univesititas Sumatera Utara.
- Sigit, Triharjono. 2013. Single Index Model Sebagai Alat Analisis Optimasilasi Portofolio Investasi Saham. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol. 04, No. 01, Maret 2013*.
- Sindi, Dwi Novita Sari. 2016. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. ALfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi 3*. Jember: Jember University Press.

**Peraturan Perundang-undangan**

BAPEPAM. 2012. Lampiran keputusan ketua bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Surat Edaran Menteri PM-PBUMN No. S-106/M-PM.PBUMN/2000 Perihal Kebijakan Penerapan *Corporate Governance* yang Baik di Semua BUMN.

Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-339/BEJ/07/2001.

**Internet**

*The Indonesia Insitute for Corporate Governance*. <http://www.iicg.org/>. (08 Desember 2016).

*Forum for Corporate Governance in Indonesia*. <http://www.fcgi.or.id/>. (08 Desember 2016).

*Corporate Governance Perception Index*. [www.cgpi.org](http://www.cgpi.org). (08 Desember 2016).

Bursa Efek Indonesia. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

**LAMPIRAN 1****Daftar Perusahaan Sampel LQ45 yang terdaftar di BEI**

<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
1	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
2	ASII	Astra International Tbk.
3	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
4	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
6	GGRM	Gudang Garam Tbk.
7	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
8	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.
9	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
10	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
11	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
12	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
13	UNTR	United Tractors Tbk.
14	WIKA	Wijaya Karya Tbk.

**LAMPIRAN 2**  
**Rangkuman Data Manajemen pajak 2013-2015**

<b>Tahun</b>	<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Beban Pajak</b>	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>Manajemen Pajak (ETR)</b>
2013	1	AKRA	117.426	733.053	0,16019
	2	ASII	5.226.000	27.523.000	0,18988
	3	BBCA	3.559.367	17.815.606	0,19979
	4	BBNI	2.220.224	11.278.165	0,19686
	5	BBTN	576.610	2.140.771	0,26935
	6	GGRM	1.552.272	5.936.204	0,26149
	7	INDF	1.252.072	4.666.958	0,26828
	8	JSMR	476.835	1.714.655	0,27809
	9	MNCN	583.687	2.393.529	0,24386
	10	PGAS	2.836.789	13.804.752	0,20549
	11	PTBA	607.081	2.461.362	0,24664
	12	TLKM	6.859.000	27.149.000	0,25264
	13	UNTR	1.788.559	6.587.337	0,27151
	14	WIKA	392.319	1.016.690	0,38588
2014	1	AKRA	202.780	993.344	0,20414
	2	ASII	5.227.000	27.352.000	0,1911
	3	BBCA	4.229.451	20.741.121	0,20392
	4	BBNI	2.694.931	13.524.310	0,19927
	5	BBTN	432.580	1.548.172	0,27941
	6	GGRM	1.810.552	7.205.845	0,25126
	7	INDF	1.828.217	6.229.297	0,29349
	8	JSMR	606.642	1.821.974	0,33296
	9	MNCN	660.347	2.543.779	0,25959
	10	PGAS	2.873.884	12.171.927	0,23611
	11	PTBA	655.512	2.674.726	0,24508
	12	TLKM	7.338.000	28.784.000	0,25493
	13	UNTR	1.781.888	6.621.858	0,26909
	14	WIKA	395.094	1.145.890	0,34479

<b>Tahun</b>	<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Beban Pajak</b>	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>Manajemen Pajak (ETR)</b>
2015	1	AKRA	233.174	1.317.021	0,7705
	2	ASII	4.017.000	19.630.000	0,20464
	3	BBCA	4.621.346	22.657.114	0,20397
	4	BBNI	2.325.616	11.466.148	0,20282
	5	BBTN	690.979	2.541.886	0,27184
	6	GGRM	2.182.441	8.635.275	0,25274
	7	INDF	1.730.371	4.962.084	0,34872
	8	JSMR	749.104	2.068.304	0,36218
	9	MNCN	491.852	1.233.488	0,39875
	10	PGAS	591.768	6.495.006	0,09111
	11	PTBA	626.685	2.663.796	0,23526
	12	TLKM	8.025.000	31.342.000	0,25605
	13	UNTR	1.400.307	4.192.746	0,33398
	14	WIKA	395.077	1.098.082	0,35979

## LAMPIRAN 3

## Rangkuman Data Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit 2013-2015

<b>Tahun</b>	<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Jumlah Dewan Komisaris</b>	<b>Jumlah Komite Audit</b>
2013	1	AKRA	3	3
	2	ASII	10	4
	3	BBCA	5	3
	4	BBNI	7	3
	5	BBTN	6	5
	6	GGRM	3	3
	7	INDF	9	3
	8	JSMR	6	3
	9	MNCN	5	3
	10	PGAS	6	5
	11	PTBA	6	4
	12	TLKM	6	5
	13	UNTR	7	3
	14	WIKA	6	5
2014	1	AKRA	3	3
	2	ASII	11	4
	3	BBCA	5	3
	4	BBNI	8	3
	5	BBTN	6	5
	6	GGRM	4	3
	7	INDF	5	3
	8	JSMR	4	3
	9	MNCN	5	3
	10	PGAS	6	5
	11	PTBA	6	4
	12	TLKM	6	5
	13	UNTR	7	3
	14	WIKA	6	5

<b>Tahun</b>	<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Jumlah Dewan Komisaris</b>	<b>Jumlah Komite Audit</b>
2015	1	AKRA	3	3
	2	ASII	11	4
	3	BBCA	5	3
	4	BBNI	9	4
	5	BBTN	7	4
	6	GGRM	4	3
	7	INDF	8	3
	8	JSMR	6	3
	9	MNCN	5	4
	10	PGAS	5	5
	11	PTBA	6	4
	12	TLKM	7	4
	13	UNTR	6	3
	14	WIKA	7	5

## LAMPIRAN 4

## Rangkuman Data Kepemilikan Institusional Tahun 2013-2015

Tahun	No.	Kode Emiten	Saham yang Beredar	Jumlah Saham Institusional	Kepemilikan Institusional
2013	1	AKRA	3.880.727.500	2.296.640.320	0,591807
	2	ASII	40.483.553.140	20.288.255.040	0,501148
	3	BBCA	24.655.010.000	12.531.092.956	0,508258
	4	BBNI	18.648.656.458	11.189.193.874	0,600000
	5	BBTN	10.564.853.500	6.353.999.999	0,601428
	6	GGRM	1.924.088.000	1.333.146.800	0,692872
	7	INDF	8.780.428.600	4.396.103.450	0,500671
	8	JSMR	6.800.000.000	4.759.999.999	0,700000
	9	MNCN	13.953.981.500	9.364.726.073	0,671115
	10	PGAS	24.241.508.196	13.800.038.755	0,569273
	11	PTBA	2.304.131.850	1.498.087.499	0,650174
	12	TLKM	100.799.996.400	51.602.353.559	0,511928
	13	UNTR	3.730.135.136	2.219.317.358	0,594970
	14	WIKA	6.139.968.000	3.999.999.999	0,651469
2014	1	AKRA	3.913.637.674	2.300.410.320	0,587793
	2	ASII	40.483.553.140	20.288.255.040	0,501148
	3	BBCA	24.655.010.000	12.535.026.664	0,508417
	4	BBNI	18.648.656.458	10.972.187.475	0,588363
	5	BBTN	10.567.696.000	6.353.999.999	0,601266
	6	GGRM	1.924.088.000	1.333.146.800	0,692872
	7	INDF	8.780.000.000	4.396.103.450	0,500695
	8	JSMR	6.800.000.000	4.759.999.999	0,700000
	9	MNCN	14.276.088.500	9.436.370.773	0,660991
	10	PGAS	24.241.508.196	13.809.038.755	0,569644
	11	PTBA	2.304.131.850	1.498.087.499	0,650174
	12	TLKM	98.175.853.600	51.602.353.559	0,525611
	13	UNTR	3.730.135.136	2.219.317.358	0,594970
	14	WIKA	6.149.225.000	3.999.999.999	0,650488

<b>Tahun</b>	<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Saham yang Beredar</b>	<b>Jumlah Saham Institusional</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
2015	1	AKRA	3.949.030.235	2.336.456.120	0,591653
	2	ASII	40.483.553.140	20.288.255.040	0,501148
	3	BBCA	24.655.010.000	12.535.159.401	0,508422
	4	BBNI	18.648.656.458	11.189.193.874	0,600000
	5	BBTN	10.582.345.000	6.353.999.999	0,600434
	6	GGRM	1.924.088.000	1.333.146.800	0,692872
	7	INDF	8.780.000.000	4.396.103.450	0,500695
	8	JSMR	6.800.000.000	4.759.999.999	0,700000
	9	MNCN	14.276.088.500	9.043.379.770	0,633463
	10	PGAS	24.241.508.196	13.809.038.755	0,569644
	11	PTBA	2.304.131.850	1.498.087.499	0,650174
	12	TLKM	98.198.216.600	51.602.353.559	0,525492
	13	UNTR	3.730.135.136	2.219.317.358	0,594970
	14	WIKA	6.149.225.000	3.999.999.999	0,650488

## LAMPIRAN 5

## Rangkuman Data Kepemilikan Manajerial Tahun 2013-2015

Tahun	No.	Kode Emiten	Saham yang Beredar	Jumlah Saham Manajerial	Kepemilikan Manajerial
2013	1	AKRA	3.880.727.500	20.177.000	0,0051993
	2	ASII	40.483.553.140	14.590.000	0,0003604
	3	BBCA	24.655.010.000	63.847.068	0,0025896
	4	BBNI	18.648.656.458	46.421.713	0,0024893
	5	BBTN	10.564.853.500	14.054.650	0,0013303
	6	GGRM	1.924.088.000	17.702.200	0,0092003
	7	INDF	8.780.428.600	1.380.020	0,0001572
	8	JSMR	6.800.000.000	961.500	0,0001414
	9	MNCN	13.953.981.500	28.311.000	0,0020289
	10	PGAS	24.241.508.196	170.500	0,0000070
	11	PTBA	2.304.131.850	60.000	0,0000260
	12	TLKM	100.799.996.400	29.160	0,0000003
	13	UNTR	3.730.135.136	2.140.605	0,0005739
	14	WIKA	6.139.968.000	13.474.500	0,0021946
2014	1	AKRA	3.913.637.674	28.270.464	0,007224
	2	ASII	40.483.553.140	11.615.000	0,000287
	3	BBCA	24.655.010.000	59.913.360	0,002430
	4	BBNI	18.648.656.458	33.693.265	0,001807
	5	BBTN	10.567.696.000	5.396.150	0,000511
	6	GGRM	1.924.088.000	17.702.200	0,009200
	7	INDF	8.780.000.000	1.380.020	0,000157
	8	JSMR	6.800.000.000	13.339.261	0,001962
	9	MNCN	14.276.088.500	13.907.800	0,000974
	10	PGAS	24.241.508.196	170.500	0,000007
	11	PTBA	2.304.131.850	60.000	0,000026
	12	TLKM	98.175.853.600	88.620	0,000001
	13	UNTR	3.730.135.136	2.140.605	0,000574
	14	WIKA	6.149.225.000	4.669.000	0,000759

<b>Tahun</b>	<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Saham yang Beredar</b>	<b>Jumlah Saham Manajerial</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
2015	1	AKRA	3.949.030.235	26.904.535	0,006813
	2	ASII	40.483.553.140	14.915.000	0,000368
	3	BBCA	24.655.010.000	52.791.031	0,002141
	4	BBNI	18.648.656.458	4.270.029	0,000229
	5	BBTN	10.582.345.000	5.496.150	0,000519
	6	GGRM	1.924.088.000	10.376.800	0,005393
	7	INDF	8.780.000.000	1.380.020	0,000157
	8	JSMR	6.800.000.000	453.200	0,000067
	9	MNCN	14.276.088.500	10.403.300	0,000729
	10	PGAS	24.241.508.196	170.500	0,000007
	11	PTBA	2.304.131.850	130.000	0,000056
	12	TLKM	98.198.216.600	4.805.427	0,000049
	13	UNTR	3.730.135.136	21.515	0,000006
	14	WIKA	6.149.225.000	3.787.700	0,000616

**LAMPIRAN 6**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Ukuran Dewan Komisaris	42	3	11	6,10	1,936
Komite Audit	42	3	5	3,71	0,835
kepemilikan institusional	42	,500671	,700000	,59516678	,067411370
kepemilikan manajerial	42	,000000	,009200	,00165161	,002492805
manajemen pajak	42	,091111	,398749	,25461884	,064313962
Valid N (listwise)	42				

**LAMPIRAN 7**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas Data**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05558933
Most Extreme Differences	Absolute	,100
	Positive	,080
	Negative	-,100
Test Statistic		,100
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

**2. Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	,015	,122		,122	,904		
	Ukuran Dewan Komisaris	-,001	,006	-,032	-,168	,868	,545	1,835
	Komite Audit	-,002	,012	-,029	-,188	,852	,820	1,220
	kepemilikan institusional	,455	,153	,477	2,983	,005	,789	1,267
	kepemilikan manajerial	-,9783	4,999	-,379	-1,957	,058	,538	1,859

a. Dependent Variable: manajemen pajak

### 3. Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,005	,074		-,064	,950
	Ukuran Dewan Komisaris	-,002	,004	-,132	-,630	,533
	Komite Audit	,006	,007	,149	,868	,391
	kepemilikan institusional	,075	,093	,142	,812	,422
	kepemilikan manajerial	-4,016	3,031	-,281	-1,325	,193

a. Dependent Variable: ABSUT

### 4. Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,519 <sup>a</sup>	,269	,190	,13308	1,736

a. Predictors: (Constant), kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: manajemen pajak

## LAMPIRAN 8

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### 1. Analisis Regresi Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,852	,147		-5,784	,000
	Ukuran Dewan Komisaris	,363	,174	,328	2,086	,044
	Komite Audit	,368	,216	,264	1,706	,096
	kepemilikan institusional	,068	,022	,481	3,138	,003
	kepemilikan manajerial	,060	,023	,454	2,646	,012

a. Dependent Variable: manajemen pajak

#### 2. Uji Adjusted R<sup>2</sup>

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,519 <sup>a</sup>	,269	,190	,13308

a. Predictors: (Constant), kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris

#### 3. Uji Statistik F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,241	4	,060	3,405	,018 <sup>b</sup>
	Residual	,655	37	,018		
	Total	,896	41			

a. Dependent Variable: manajemen pajak

b. Predictors: (Constant), kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris

## 4. Uji Statistik T

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,852	,147		-5,784	,000
	Ukuran dewan komisaris	,363	,174	,328	2,086	,044
	komite audit	,368	,216	,264	1,706	,096
	kepemilikan institusional	,068	,022	,481	3,138	,003
	kepemilikan manajerial	,060	,023	,454	2,646	,012

a. Dependent Variable: manajemen pajak





**LAMPIRAN 9**  
**TABEL DURBIN-WATSON (DW)**

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$ 

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725

LAMPIRAN 10

TABEL F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05											
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01